



FOREIGN INVESTOR'S CLAIMS AGAINST NATIONAL TOBACCO PACKAGING POLICY STIPULATED UNDER WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL

Written by:

Arinta Pratiwi,¹ M. Hawin²

ABSTRACT

In 2003, countries under the WHO have established the first international public health convention regulating tobacco sale called the FCTC. The regulation is aimed to curb tobacco consumption and protect public health. However, upon enacting national policy as mandated by the FCTC, member states often faced legal challenges from global tobacco companies under international investment law. As a consequence, a lot of states became reluctant to uphold stricter tobacco-control measure.

Therefore, this thesis attempted to explain the relationship between international investment law and tobacco packaging policy under the FCTC. In doing so, the author conducted a normative legal research which analyzed principles of international investment law related to the protection of national public health and the decision of international investment tribunals relating to the enactment of national tobacco packaging law.

The research concluded that FCTC mandated tobacco packaging regulations are in line with international investment law and that there are possible legal safeguards states could take in order to protect their autonomy when regulating the tobacco industry.

KEYWORDS: BIT, FCTC, International Investment Law, Tobacco Packaging

¹ Undergraduate Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

² Lecturer of Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada



**KLAIM INVESTOR ASING TERHADAP PERATURAN KEMASAN TEMBAKAU
NASIONAL YANG DIATUR DALAM FRAMEWORK CONVENTION ON
TOBACCO CONTROL WHO**

oleh:

Arinta Pratiwi,³ M. Hawin⁴

INTISARI

Pada tahun 2003, negara-negara di bawah WHO telah membentuk konvensi kesehatan masyarakat internasional pertama yang mengatur penjualan tembakau yang disebut FCTC. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengekang konsumsi tembakau dan melindungi kesehatan masyarakat. Namun, setelah memberlakukan kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan oleh FCTC, negara-negara anggota sering menghadapi tantangan hukum dari perusahaan tembakau global di bawah hukum investasi internasional. Sebagai akibatnya, banyak negara menjadi enggan untuk menegakkan tindakan pengendalian tembakau yang lebih ketat.

Oleh karena itu, tesis ini akan mencoba untuk menjelaskan hubungan antara hukum investasi internasional dan kebijakan pengemasan tembakau di bawah FCTC. Dengan demikian, Penulis melakukan penelitian hukum normatif yang menganalisis prinsip-prinsip hukum investasi internasional yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat nasional dan keputusan pengadilan investasi internasional yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum kemasan tembakau nasional.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa FCTC mengamankan peraturan kemasan tembakau yang sejalan dengan hukum investasi internasional dan bahwa ada kemungkinan negara pengamanan hukum dapat mengambil untuk melindungi otonomi mereka dalam mengatur industri tembakau.

KEYWORDS: BIT, FCTC, Hukum Investasi Internasional, Kemasan Tembakau

³ Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

⁴ Dosen Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada